



FENOMENA KESADARAN BELA NEGARA DI ERA DIGITAL DALAM PERSPEKTIF KETAHANAN NASIONAL

Kolonel Laut (Kh) Dr. Dwi Hartono, S.Pd, M.AP

Kasubdit Kepemimpinan Nasional

Direktorat Pengkajian Ideologi dan Politik

Deputi Bidang Pengkajian Strategik Lemhannas RI

E-mail: dwihartono11328@gmail.com.

Abstrak

Di tengah kondisi negara yang sedang mengalami berbagai permasalahan kebangsaan, akhir-akhir ini ditenggarai bahwa semangat nasionalisme, patriotisme dan bela negara, khususnya kalangan generasi muda di era digital menunjukkan kecenderungan menurun atau memudar. Beberapa indikasi antara lain adalah munculnya semangat kedaerahan yang berlebihan, merebaknya fanatisme dan intoleransi terhadap agama yang berujung pada kebencian antar umat beragama, ketidakpedulian terhadap bendera dan lagu kebangsaan, kurangnya apresiasi terhadap kebudayaan dan kesenian daerah, konflik antar etnis yang mengakibatkan pertumpahan darah. Memudarnya semangat nasionalisme, patriotisme dan bela negara tersebut antara lain disebabkan oleh masih rendahnya kesadaran bela negara, belum optimalnya kurikulum pendidikan dan pembinaan bela negara dan belum sinergisnya Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam pemilihan metode dan materi pembinaan kesadaran bela negara di era digital. Kenyataan yang terjadi saat ini, kesadaran warga negara khususnya generasi muda di era digital dalam hal bela negara masih perlu ditingkatkan.

Katakunci: bela negara, era digital, ketahanan nasional



*“...Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu, Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, **pribang-pribangsaku** (pribadi bangsaku), ayo maju-maju, ayo maju-maju, ayo maju-maju...” (Sudharnoto, 1956).*

PENDAHULUAN

Syair lagu di atas mengingatkan kita pada masa tahun 1970-an hingga 1980-an, dimana sering terjadi kesalahan secara berjamaah dalam menyanyikan lagu tersebut yang telah mendarah-daging dan turun temurun. Dalam kilasan sejarah perjuangan bangsa Indonesia, lagu-lagu kebangsaan yang memunculkan semangat, nasionalisme, sikap patriotisme dan bela negara memang selalu terngiang dalam ingatan kolektif masyarakat Indonesia waktu itu. Lagu-lagu perjuangan waktu itu sering berkumandang sebagai “lagu wajib” di sekolah-sekolah. Kita bahkan dipaksa harus menghafal lagu-lagu perjuangan dan menyanyikannya satu per satu di depan kelas.

Kenyataan saat ini, lagu-lagu perjuangan tersebut jarang terdengar berkumandang di sekolah-sekolah. Bahkan cibiran dan pelecehan terhadap lagu-lagu

kebangsaan dengan cara dipelesetkan atau diparodikan sebagai bahan candaan sering dilakukan oleh generasi-generasi muda di era digital saat ini. Di sekolah misalnya, setiap hari Senin selalu diadakan upacara bendera, yang tujuan awalnya adalah menumbuhkan rasa disiplin, semangat nasionalisme, patriotisme dan bela negara sebagai wujud bakti dalam menghargai jasa para pahlawan kusuma bangsa dalam meraih dan mempertahankan kemerdekaan, namun sikap menghargai itu sama sekali tidak tampak adanya keseriusan dalam mengikuti jalannya prosesi upacara bendera. Mulai dari tidak sempurnanya sikap hormat pada “Sang Merah Putih” hingga pada saat menyanyikan syair lagu kebangsaan “Indonesia Raya”.

Demikian juga peringatan hari Kemerdekaan setiap tanggal 17 Agustus selama puluhan tahun terkesan hanya sebagai ritual upacara rutinitas saja.

Tradisi lomba makan krupuk, panjat pinang, panggung hiburan yang dari tahun ke tahun hanya dianggap sebagai hiburan belaka. Sedikit sekali kelompok masyarakat yang merayakan hari kemerdekaan dengan acara syukuran dan berdoa bersama mengingat jasa para pahlawan yang telah mengorbankan nyawa untuk mencapai kemerdekaan. Di sisi lain, ada yang berpendapat bahwa memudarnya kebanggaan terhadap bangsa sendiri semakin terasa seiring dengan hilangnya mata Pendidikan Moral Pancasila (PMP) dan Pendidikan Sejarah dan Perjuangan Bangsa (PSPB) sebagai salah satu mata pelajaran yang ada di sekolah. Mata pelajaran tersebut dirasa sangat punya andil dalam memberikan pengetahuan dan pembelajaran terhadap sikap toleransi antar sesama warga negara dan sikap bela negara sebagai aplikasi dari sila-sila dalam Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika. Kala itu, siswa akan berhenti dari semua aktifitasnya ketika mendengarkan kumandang lagu kebangsaan Indonesia Raya. TNI dan Polisi yang berjaga pun akan marah dan memberi hukuman *push up* atau *squat jump*, jika mengetahui orang beraktifitas pada saat ada pengibaran bendera Merah Putih dan nyanyian lagu Indonesia Raya.

Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional, pengertian bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara, baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan Negara dari berbagai Ancaman. Mencermati pengertian tersebut, dapat diartikan bahwa Bela Negara merupakan hak dan kewajiban bagi setiap Warga Negara yang diselenggarakan melalui usaha Pertahanan Negara untuk menegakkan kedaulatan negara, menjaga

keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa. Bela Negara dilaksanakan atas dasar kesadaran warga Negara serta keyakinan pada kekuatan sendiri yang ditumbuhkembangkan melalui usaha Bela Negara.

Namun dalam kenyataannya, keadaan sekarang menjadi terbalik, sikap patriotisme kurang dimiliki oleh generasi muda era digital saat ini. Semangat bela negara, sikap patriotisme dan patriotism saat ini sudah mulai memudar. Sekolah sebagai pusat pembelajaran dan pelatihan tidak lagi menyentuh materi-materi pembelajaran yang demikian. Masih rendahnya kesadaran bela negara, belum optimalnya kurikulum pendidikan dan pembinaan bela negara dan belum sinergisnya Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan metode dan materi pembinaan kesadaran bela negara di era digital menjadi pokok persoalan yang harus segera dicari solusi pemecahannya. Pertanyaan besar yang muncul adalah Fenomena apa yang sedang terjadi pada generasi di era digital saat ini? Siapa yang salah? Apakah ini indikasi memudarnya semangat bela negara? Apa yang harus kita lakukan untuk meningkatkan semangat bela negara?

PEMBAHASAN

Kondisi Bela Negara Di Era Digital Saat Ini

Bela negara bukan sekedar menjadi tanggung jawab TNI dan Polri saja, tetapi merupakan tanggung jawab semua komponen bangsa, termasuk generasi muda di era digital saat ini. Selama ini yang terjadi, bela negara lebih dimaknai sebagai pemahaman yang bersifat fisik saja. Banyak yang mengira bahwa bela negara identik dengan “angkat senjata”. Bela negara adalah sama dengan “wajib militer?”. Program bela negara biasanya identik dengan upacara, baris berbaris, ceramah, atau kegiatan lapangan yang menimbulkan kesan kalau program bela negara berarti pelatihan semi militer atau



bersifat militeristik. Efeknya, banyak orang khususnya generasi muda yang enggan untuk mengikuti program bela negara. Konsep bela negara nampaknya belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat, termasuk generasi muda di era digital.

Menghadapi masalah ini, Hamid Muhammad menegaskan bahwa ancaman nyata terhadap jati diri generasi bangsa saat ini adalah narkoba, pornografi (HIV/AIDS/LGBT), hoaks, dan radikalisme/terorisme. Sedangkan ancaman nyata terhadap kekerasan dan radikalisme di dunia pendidikan saat ini antara lain sebagai berikut.

- a. 84% siswa pernah mengalami kekerasan di sekolah
- b. 75% siswa mengakui pernah melakukan kekerasan di sekolah
- c. 45% siswa laki-laki menyebutkan bahwa guru atau petugas sekolah merupakan pelaku kekerasan
- d. 22% siswa perempuan menyebutkan bahwa guru atau petugas sekolah merupakan pelaku kekerasan
- e. 40% siswa usia 13-15 tahun melaporkan pernah mengalami kekerasan fisik oleh teman sebaya
- f. 50% anak melaporkan mengalami perundungan (*bullying*) di sekolah.
- g. 48,9% siswa Jabodetabek setuju aksi radikal.

Masih menurut Hamid Muhammad, menambahkan bahwa fenomena radikalisme yang dapat mengancam dunia pendidikan saat ini antara lain:

- a. Sekolah dijadikan sebagai tempat menyebarkan radikalisme/terorisme melalui kegiatan pembelajaran di kelas dan di luar kelas: melalui buku pelajaran, kegiatan ekstra kurikuler/kerohanian, dan pertemuan-pertemuan.
- b. Beberapa kejadian sekolah, guru, dan siswa menghindari dari kegiatan

upacara bendera dan pelajaran kewarganegaraan/sejarah.

- c. Pola penyebaran kekerasan semakin kuat melalui media *online*, media sosial, dan media internet lainnya yang sangat dekat dengan kehidupan siswa.
- d. Beberapa kejadian tindak radikalisme dilakukan oleh pelajar (usia sekolah)
 - 1) Kasus teror di Klaten (2011) dan Solo (2015)
 - 2) Kasus di Medan (2016)
 - 3) Kasus anak SMA berangkat ke Syiria di Jakarta (2016)
 - 4) Video anak-anak Indonesia di Syiria (2016)
 - 5) Kasus rentetan teror di Surabaya (2016)

Lebih khusus lagi, Esa Sukmawijaya menyatakan bahwa jumlah pemuda usia 16 sampai 30 tahun pada tahun 2018 sebanyak 63,82 juta (24,15%). Sedangkan tingkat partisipasi keagamaan pemuda menunjukkan kecenderungan menurun. Tahun 2009 tingkat partisipasi keagamaan 67%, tahun 2012 sebesar 55%, dan tahun 2015 menjadi 51%. Sementara itu, berdasarkan data *survey Wahid Foundation* dan LSI menemukan bahwa:

- a. 59,9 % responden memiliki rasa benci terhadap nonmuslim, etnis Tionghoa, komunis dan orang-orang yang berbeda dengan mereka.
- b. 92,2 % dari jumlah 59,9 % yang bersikap menolak orang yang dibenci menjadi pejabat di Indonesia.
- c. 82,4 % dari 59,9 % tidak mau bertetangga dengan orang yang dibenci.

Hal tersebut diperparah lagi bahwa saat ini kita tengah dihadapkan kepada

persoalan yang rumit, antara kebenaran dan kebohongan yang semakin sulit dibedakan. Kabar bohong kembali mengalami kebangkitan di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Sebagai gambaran, berikut ini beberapa temuan yang didapatkan berdasarkan Laporan “DailySosial” terkait dengan Distribusi Hoax di Media Sosial pada tahun 2018 yang terjadi di Indonesia:

- a. Informasi *hoax* paling banyak ditemukan di platform Facebook (82,25%), WhatsApp (56,55%), dan Instagram (29,48%).
- b. Sebagian besar responden (44,19%) tidak yakin memiliki kepiawaian dalam mendeteksi berita *hoax*.
- c. Mayoritas responden (51,03%) dari responden memilih untuk berdiam diri (dan tidak percaya dengan informasi) ketika menemui *hoax*

Di lain kesempatan, berdasarkan data dari Kementerian Komunikasi dan Informasi menyatakan bahwa jumlah pengguna media sosial di Indonesia telah mencapai sekitar 132,7 juta orang dan ada sekitar 800.00 situs di Indonesia yang telah terindikasi sebagai penyebar informasi palsu. Hal tersebut sejalan dengan temuan dari Badan Intelijen Negara (BIN) yang

menyatakan bahwa konten-konten media sosial di Indonesia ternyata didominasi informasi bohong atau *hoaks*. Hal ini yang menyebabkan masyarakat mudah terpengaruh dengan berita-berita tersebut. Dari penelitian, informasi *hoaks* sudah mencakup 60 % dari konten media sosial di Indonesia dan 39% mahasiswa terpapar paham-paham radikal serta 24% mahasiswa setuju menegakkan negara Islam melalui Jihad. Bibit radikal juga ditemukan pada pelajar SMA (*Kompas*, 25/05/2019)

Lebih lanjut Timbul Siahaan mengatakan bahwa, program bela negara adalah respons Kementerian Pertahanan RI dalam mewujudkan program revolusi mental yang digagas Presiden Joko Widodo. Melalui program ini, diharapkan masyarakat dapat diberikan kesadaran akan konsep bela negara yang terdiri dari nilai-nilai cinta tanah air, rela berkorban, dan yakin dengan ideologi Pancasila. Materi dalam program bela negara ini terbagi menjadi 70-80 persen teori, dan 20-30 persen praktek di lapangan. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Bondan Tiara Sofyan yang menjelaskan bahwa materi pembinaan kesadaran bela negara sebagaimana terlihat dalam table di bawah ini:

Tabel 1. Materi Pembinaan Kesadaran Bela Negara Kemenhan RI

Materi Pokok	Materi Pendukung	Materi Tambahan
<ul style="list-style-type: none"> •Tataran Dasar Bela Negara •Wawasan Kebangsaan •4 Konsensus Dasar •Sistem Pertahanan Semesta 	<ul style="list-style-type: none"> •Bahaya Radikalisme&Terorisme •Bahaya Narkoba •Kerukunan umat beragama •Penanggulangan bencana alam •Kearifan lokal •Kepemimpinan 	<ul style="list-style-type: none"> •Dinamika kelompok •PBB, penghormatan & upacara bendera •Kegiatan praktek dan outbond

Sumber data : Bahan paparan Dirjen Potan Kemhan RI dalam FGD Tim Kajian Wantimpres 2019

Disisi lain, terkait dengan materi pokok pembinaan bela negara, berdasarkan Modul I Konsepsi Bela Negara yang dikeluarkan oleh Dewan Ketahanan Nasional Tahun 2018 meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Nilai Dasar Bela Negara, meliputi:
 - 1) Cinta tanah air

- 2) Sadar berbangsa dan bernegara
- 3) Setia kepada Pancasila sebagai Ideologi Bangsa
- 4) Rela berkorban untuk bangsa dan negara
- 5) Mempunyai kemampuan awal bela negara



- 6) Semangat untuk mewujudkan negara yang berdaulat, adil dan Makmur
- b. Konsensus Dasar Berbangsa dan Bernegara, meliputi : Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.
- c. Integritas Nasional, Etika, dan Supremasi Hukum
- d. Kearifan dan keunggulan lokal untuk kesejahteraan rakyat.
- f. Masih rendahnya rasa kesetiakawanan sosial
- g. Kurang adanya rasa toleransi terhadap orang lain baik secara individu maupun kelompok.
- h. Belum mampu secara tulus menerima perbedaan yang ada
- i. Sangat sensitif dan mudah terjadinya perpecahan

Namun dalam prakteknya, rumusan-rumusan tersebut di atas masih sering kali dianggap terlalu konseptual dan sulit dipahami oleh masyarakat luas, sehingga perlu dicari ide-ide segar, inovasi dan kreatifitas baru agar materi pembinaan bela negara tersebut tidak terkesan militeristik, menarik, dan tidak membosankan.

Di lain pihak, meskipun pemerintah telah banyak melakukan program pembinaan kesadaran bela negara melalui penyiapan modul dan materi pokok, materi pendukung, dan materi tambahan tersebut di atas, namun belum mencapai hasil yang optimal seperti yang diharapkan, sehingga masih banyak terjadi perilaku destruktif dari warga negara yang dapat melemahkan keutuhan NKRI. Secara garis besar, implikasi dari belum optimalnya kesadaran bela negara dapat dikemukakan antara lain sebagai berikut:

- a. Menurunnya rasa kebanggaan sebagai bangsa Indonesia
- b. Kurang adanya kepedulian dalam membela negara
- c. Lemahnya persatuan dan kesatuan di kalangan para pemuda
- d. Mudah tersulut konflik diantara kelompok pemuda
- e. Kurangnya rasa tanggungjawab dalam memajukan bangsa dan negara

Berbagai ilustrasi tersebut memperlihatkan bahwa masih lemahnya pemahaman bela negara. Kondisi ini mencerminkan bahwa secara kultural implementasi konsep bela negara yang diatur dalam UUD 1945 dan UU RI Nomor 3 Tahun 2003 belum berjalan secara maksimal. Fenomena-fenomena tersebut di atas menjadi *early warning* bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hal ini terjadi karena pemahaman dan *spirit* bela negara warga bangsa Indonesia yang masih rapuh sebagai dampak dari persepsi terhadap bela negara yang belum utuh dan belum tertanam secara kuat. Akibatnya, hal tersebut turut memberikan kontribusi terhadap menurunnya semangat bela negara dan meningkatnya potensi kerawanan yang dapat berpengaruh terhadap stabilitas nasional yang pada akhirnya akan berimplikasi munculnya berbagai persoalan bangsa yang dapat melemahkan dan mengganggu ketahanan nasional.

Pokok-pokok persoalan yang ditemukan

Berdasarkan analisis dan identifikasi masalah terhadap program pembinaan kesadaran bela negara di era digital yang terjadi pada saat ini dan mengkaji bagaimana implikasi kesadaran bela negara untuk memperkuat ketahanan nasional, maka terdapat pokok-pokok persoalan yang ditemukan, yaitu:

- a. **Belum optimalnya kurikulum pendidikan dan pembinaan bela negara generasi muda di era digital.**

Program pendidikan dan pembinaan kesadaran bela negara yang dilaksanakan pemerintah belum secara optimal dilaksanakan kepada generasi muda di era digital, sehingga masih banyak generasi muda yang perlu dibina dan ditingkatkan terkait kesadaran bela negara saat ini. Hal ini dapat menyebabkan kurangnya pemahaman warga negara, terutama kalangan generasi muda untuk mengerti tentang arti pentingnya revitalisasi nilai-nilai kesadaran bela negara. Disamping itu, dengan hilangnya mata pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP) dan Pendidikan Sejarah dan Perjuangan Bangsa (PSPB) dalam kurikulum Pendidikan, baik di tingkat Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA) dapat berimplikasi terhadap menurunnya tingkat kesadaran bela negara dan rasa kebanggaan sebagai bangsa Indonesia.

b. Masih rendahnya kesadaran bela negara generasi muda di era digital

Saat ini, masih jarang metode dan materi bela negara yang mengedepankan penyajian secara dialogis, aktivitas mengasah otak atau aspek kognitif yang merupakan akumulasi dan hasil pengolahan otak terhadap data, informasi, dan pengetahuan yang diperoleh manusia, sehingga bisa memperkuat ideologi para peserta terhadap empat pilar kebangsaan, yaitu Pancasila, UUD 45, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika. Kesadaran bela negara di kalangan generasi muda di era digital masih rendah, kurang peduli dan rasa tanggung jawab dalam memajukan bangsa dan negara, masih seringnya terjadi konflik antar pemuda, masih kurangnya rasa kesetiakawanan sosial, belum mampu secara tulus menerima perbedaan yang ada, dan berkurangnya sikap menghargai budaya bangsa sendiri serta berkembangnya sikap hedonis, fragmatis, materialistik dan lain-lain. Fenomena tersebut menunjukkan masih rendahnya kesadaran bela negara yang diyakini dapat melemahkan ketahanan nasional.

c. Belum sinergisnya Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan materi pembinaan kesadaran bela negara di era digital

Dalam pelaksanaan pembinaan kesadaran bela negara, Kementerian/Lembaga maupun Pemerintah Daerah belum sinergis dan masih terkesan jalan sendiri-sendiri. Koordinasi yang dilaksanakan belum melibatkan seluruh *stakeholder* yang terkait. Belum terbangunnya jejaring strategis antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dengan warga negara. Selain itu, pelaksanaan kegiatan bela negara tidak boleh monopoli oleh satu kementerian ataupun lembaga. Alasannya, bela negara bukan hanya semata-mata kegiatan militer atau pertahanan. Bela negara adalah semangat dan jiwa kejuangan semua anak bangsa. Bela negara sebagai kewajiban seluruh anak bangsa untuk menjaga negaranya. Bela negara jangan hanya dipersempit dalam kegiatan militer atau pertahanan. Bela negara itu sangat luas karena mencakup semua bidang.

Analisis Pembinaan Bela Negara Generasi Muda Di Era Digital

*“.....Garuda di dadaku,
Garuda kebanggaanku,
Ku yakin hari ini pasti menang
Kobarkan semangatmu
Tunjukkan keinginanmu
Ku yakin hari ini pasti menang”*

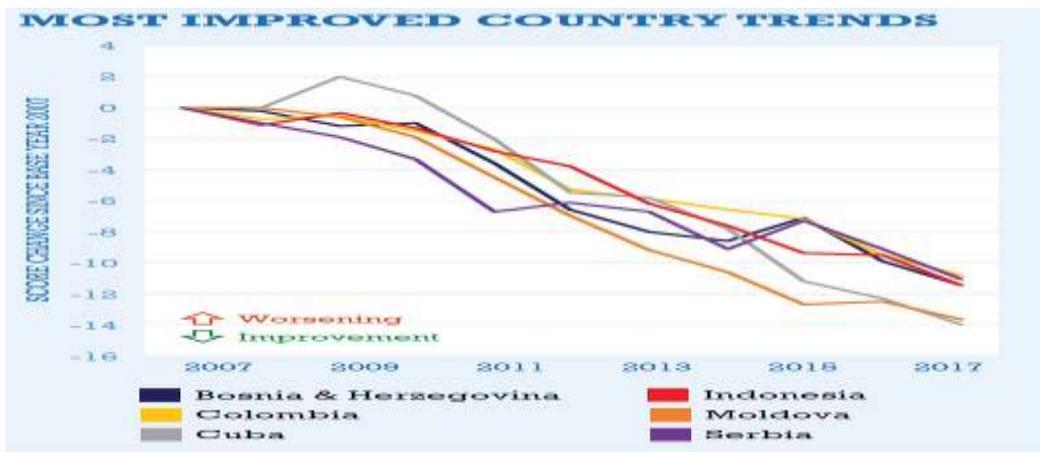
(yel-yel supporter sepakbola)

Di tengah gegap-gempita euforia kemenangan Timnas PSSI dalam ajang kualifikasi Piala Asia U 19 tahun 2020 atas kesebelasan Timor Leste dan Hongkong, serta mampu menahan imbang 1-1 dengan Korea Utara, lagu “Garuda di Dadaku” yang dinyanyikan secara berjamaah oleh paduan suara *supporter* bola, ternyata gema dan gaungnya mampu membangkitkan *spirit* kebangsaan dan memacu semangat juang

pantang menyerah Timnas Indonesia untuk berjibaku menaklukkan lawan tandingnya. Kemenangan demi kemenangan ini semoga menandai kebangkitan dan kebanggaan dunia sepakbola kita yang cukup lama terpuruk. Lagu yang narasi dan notasinya mirip dengan lagu “Apuse” dari Biak (Papua) kini sudah menjadi milik rakyat dan bangsa Indonesia. Lagu ini pun tak pernah absen dan selalu menjadi lagu wajib yang dinyanyikan para *supporter* Indonesia yang menyemangati langsung di lapangan maupun tak langsung seperti di rumah-rumah atau di tempat-tempat nonton bareng (nobar) dalam *event* olahraga.

Sementara itu, walaupun masih diwarnai dengan dinamika sosial politik yang cenderung memanas akhir-akhir ini,

namun hingga kini masih dapat dikatakan bahwa kondisi stabilitas negara yang dinilai cukup stabil, sebagaimana dinilai oleh lembaga-lembaga Internasional. Salah satu hal yang menarik untuk dikemukakan adalah penilaian yang dilakukan oleh lembaga *Fund For Peace* (FFP) yaitu lembaga independen yang berkedudukan di Washington, D.C. yang setiap tahunnya mengeluarkan hasil pengukuran mengenai tingkat kerentanan dan ketahanan suatu negara. Menurut FFP Indonesia termasuk salah satu negara berkembang yang memiliki tingkat ketahanan yang cenderung semakin membaik bahkan dinyatakan sebagai negara yang termasuk pada kelompok “*Most Improved country*” sebagaimana digambarkan pada gambar di bawah ini.



Gambar. 1 Tingkat kerentanan dan ketahanan nasional Indonesia menurut *Fund Fo Peace* 2017

Pada grafik di atas terlihat perkembangan tingkat ketahanan Indonesia memiliki kecenderungan yang membaik secara dramatis pada 10 tahun terakhir ini yaitu dari tahun 2007 sampai tahun 2017. Demikian juga pada tahun 2018 dan tahun 2019, walaupun masih berada pada tingkat “*elevated warning*” namun kecenderungannya terus membaik. Pada tahun 2017 besarnya indeks adalah 72,9 kemudian pada tahun 2018 score indeksnya 72.30 dan pada tahun 2019 mencapai 70,4. Pada tahun 2019 ini indeksnya lebih kecil dibandingkan dengan

indeks pada tahun 2017 dan tahun 2018. Capaian tahun 2019 ini sangat baik karena terjadi penurunan yang cukup tinggi yaitu sebesar 1.9 point. Turunnya *score* indeks ini memberikan makna bahwa tingkat kerentanan Indonesia semakin mengecil artinya tingkat ketahanannya semakin membaik.

Hasil penilaian dari lembaga Internasional ini sejalan dengan hasil pengukuran Indeks Ketahanan Nasional (IKN) yang dilakukan oleh Lemhannas RI. IKN diukur dengan nilai 0 untuk peringkat

terendah sampai dengan nilai 5 untuk peringkat tertinggi. Pembagian penilaian peringkat seperti terlihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2. Tingkat Ketangguhan Ketahanan Nasional

No	TINGKAT KETANGGUHAN	WARNA	ANGKA
1	Rawan	Merah	1,00 s.d. 1,80
2	Kurang Tangguh	Kuning	> 1,80 s.d. 2,60
3	Cukup Tangguh	Hijau	> 2,60 s.d. 3,40
4	Tangguh	Biru	> 3,40 s.d. 4,20
5	Sangat Tangguh	Ungu	> 4,20 s.d. 5,00

Sumber data: Puslabkurtannas Lemhannas RI Tahun 2018

Adapun makna setiap kategori ketahanan nasional sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3. Makna setiap kategori ketahanan nasional

Rawan	Kurang Tangguh	Cukup Tangguh	Tangguh	Sangat Tangguh
<p>Apabila kondisi dinamik berada pada kondisi yang sangat lemah.</p> <p>Dalam kondisi ini ancaman sekecil apapun akan membahayakan integritas, identitas dan kelangsungan hidup bangsa dan negara.</p> <p>Kondisi ini disebut juga <i>at risk</i>.</p>	<p>Apabila keuletan dan ketangguhan bangsa berada pada kondisi lemah.</p> <p>Dalam jangka pendek negara masih dapat bertahan dari berbagai TAHG.</p> <p>Apabila tidak segera ada perbaikan yang signifikan, maka dalam jangka panjang stabilitas nasional akan goyah.</p> <p>Kondisi ini disebut juga <i>warning</i>.</p>	<p>Apabila keuletan dan ketangguhan bangsa berada pada kondisi cukup memadai dalam menghadapi TAHG.</p> <p>Beberapa kelemahan internal perlu segera diperbaiki agar TAHG tidak sampai melemahkan stabilitas dan integritas nasional.</p> <p>Kondisi ini merupakan tahap awal dari kondisi <i>moderate</i>.</p>	<p>Apabila keuletan dan ketangguhan bangsa berada pada kondisi baik.</p> <p>Dalam kondisi ini segenap TAHG dapat diatasi.</p> <p>Harus tetap diwaspadai adanya TAHG berkepanjangan yang akan melemahkan stabilitas dan integritas nasional.</p> <p>Kondisi ini lebih baik dari kondisi cukup tangguh, namun masih berada di kelompok <i>moderate</i>, dalam pematangan menuju ke <i>sustainable</i>.</p>	<p>Apabila keuletan dan ketangguhan bangsa berada pada kondisi sangat baik dan prima.</p> <p>Dalam kondisi ini segenap TAHG dapat diatasi dengan baik.</p> <p>TAHG tidak akan menggoyahkan ketahanan nasional, bahkan dapat diubah menjadi peluang (<i>opportunity</i>).</p> <p>Kondisi ini disebut juga <i>sustainable</i>.</p>

Sumber data: Puslabkurtannas Lemhannas RI Tahun 2018

Sedangkan capaian nilai variabel dari setiap gatra sebagai aspek ketahanan nasional tahun 2018 menurut Puslabkurtannas, seperti tercantum di bawah ini:

Tabel 4. Indeks Ketahanan Nasional Wilayah Nasional dan Capaian Tahun 2018

INDEK KETAHANAN NASIONAL	Desember 2018	
	Skor	Rank
Indek Ketahanan Nasional	2,69	

GATRA	Desember 2018	
	Skor	Rank
Geografi	2,71	

Demografi	3,32	
Sumber Kekayaan Alam	2,78	
Ideologi	2,44	
Politik	2,67	
Ekonomi	2,86	
Sosial Budaya	2,30	
Pertahanan dan Keamanan	2,79	

Sumber data: Puslabkurtannas Lemhannas RI Tahun 2018

Sehubungan dengan hasil pengukuran Puslabkurtannas, IKN tahun 2018, dari 8 (delapan) aspek Astagatra, berada pada katagori “Cukup Tangguh” dengan nilai sebesar 2,69, artinya keuletan dan ketangguhan bangsa berada pada “Cukup Memadai” dalam menghadapi berbagai tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan. Dengan kata lain, dalam jangka pendek negara masih dapat bertahan dari berbagai tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan di masa yang akan datang. Namun beberapa kelemahan internal perlu segera diperbaiki. Apabila tidak segera ada perbaikan yang signifikan, maka stabilitas nasional akan terancam. Ada 2 (dua) gatra yang berkontribusi “Kurang Tangguh”, yaitu gatra ideologi (2,44) dan sosial budaya (2,30). Gatra lain terbilang “Cukup Tangguh”, yaitu geografi (2,71), demografi (3,32), sumber kekayaan alam (2,78), politik (2,67), ekonomi (2,86), dan hankam (2,79).

Sementara itu, apabila kita cermati IKN dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, menunjukkan kecenderungan tingkat ketahanan nasional yang semakin membaik dan meningkat dari tahun ke tahun, namun belum menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan. Masih perlu kebijakan, strategi dan upaya yang lebih nyata dalam mewujudkan tingkat ketahanan nasional yang minimal tangguh guna menghadapi berbagai tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan di masa yang akan datang.

Tabel 5. Indeks Ketahanan Nasional Tahun 2014-2018

KETERANGAN	INDEKS KETAHANAN NASIONAL				
	2014	2015	2016	2017	2018
Gatra Geografi	2,60	2,41	2,68	2,56	2,71
Gatra Demografi	2,76	2,83	2,96	3,12	3,32
Gatra Sumber Kekayaan Alam	2,61	2,77	2,56	2,58	2,78
Gatra Ideologi	2,30	2,23	2,06	2,06	2,44
Gatra Politik	2,62	2,39	2,43	2,43	2,67
Gatra Ekonomi	2,94	2,63	2,73	2,78	2,86
Gatra Sosial Budaya	1,91	2,20	2,14	2,17	2,30
Gatra Pertahanan dan Keamanan	2,75	2,82	3,08	3,08	2,79
Indek Ketahanan Nasional	2,56	2,55	2,60	2,62	2,69

Sumber data: Puslabkurtannas Lemhannas RI Tahun 2018

Mencermati hasil pengukuran IKN tersebut di atas, dapat kita analisis bahwa perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin luas telah memengaruhi berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Gatra ideologi dan sosial budaya pun merasakan dampak perkembangan teknologi informasi secara langsung maupun tidak langsung. Beragam kemudahan tersebut berdampak kepada karakter, sifat, sikap dan perilaku manusia, dan pada akhirnya dapat merubah suatu kebiasaan menjadi pola kebiasaan yang baru. Hal tersebut terbukti pada variabel gatra ideologi, khususnya aspek toleransi (skor 1,20) dan solidaritas sosial (skor 1,77) yang menunjukkan warna merah (rawan), artinya dalam kondisi ini mengindikasikan bahwa ancaman sekecil apapun akan membahayakan integritas, identitas dan kelangsungan hidup bangsa. Hal yang sama juga terjadi pada gatra sosial budaya, khususnya variabel kerukunan sosial (skor 1,00) yang menunjukkan dalam kondisi dinamik sangat lemah.

a. Kurikulum pendidikan dan pembinaan bela negara bagi warga negara di era digital.

“...Jangan tanyakan apa yang negara ini berikan kepadamu tapi tanyakan apa yang telah kamu berikan kepada negaramu...”

(John Fitzgerald Kennedy, USA)

Pada hakikatnya, negara merupakan ‘benda mati’ yang tidak bisa memberikan apapun kepada kita. Negara baru akan terasa memberikan sesuatu kepada warganya ketika ada ‘aksi’ yang kita berikan untuk kemajuan negara tersebut. Tapi permasalahannya adalah, *apakah kita sudah pernah menjawab pertanyaan tersebut, apa yang telah kita berikan pada negaramu? Sudahkah kita membela Indonesia? Bukankah setiap tempat dimana seseorang telah menjadikannya sebagai ruang hidup atau ruang juang wajib*

*dipertahankan atau dibela? (Teori Hegel tentang Bela Negara, *Defending country*).*

Wacana mengenai peningkatan kesadaran bela negara melalui pendidikan menimbulkan pertanyaan kritis pada dunia pendidikan kita saat ini. *Apakah pendidikan yang berlaku di setiap jenjangnya selama ini belum mampu menumbuhkan kesadaran akan cinta tanah air dan bela negara?* Fenomena yang terjadi saat ini di Indonesia sepertinya sedikit bergeser dari nilai-nilai yang telah disepakati bersama. Permasalahan kebangsaan di berbagai sektor yang terjadi saat ini, nampak semakin memburuk, sepertinya menjadi alasan utama mengapa banyak di antara kita sebagai warga negara lebih mengedepankan kritik dan keluhannya terhadap kondisi yang terjadi saat ini ketimbang melihat sejauh mana kontribusi yang telah kita berikan kepada negeri ini.

Seperti kita ketahui bersama, setelah membangun infrastruktur, pemerintah menargetkan membangun sumber daya manusia yang berkualitas untuk mencapai Indonesia yang maju. Pendidikan yang menjadi sektor terdepan untuk mencapai tujuan ini diharapkan tidak hanya mewujudkan manusia yang pandai di bidang akademik, tetapi juga berkarakter. Pada peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2019, Presiden Joko Widodo mengingatkan untuk terus membangun karakter bangsa. Hal ini harus menjadi perhatian dunia pendidikan Indonesia. Pembangunan karakter bangsa, budi pekerti, sopan santun, nilai-nilai etika dan agama ke depan harus menjadi perhatian kita dalam rangka pembangunan manusia, baik karakter maupun kualitasnya. Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dalam pidatonya menyampaikan bahwa untuk mencapai Indonesia yang maju, Kemendikbud memiliki tiga rencana utama, yaitu: peningkatan kualitas pendidikan usia dini, pembentukan karakter anak, dan menyiapkan peserta didik agar terampil dalam menggunakan teknologi. (*Kompas*, 3 Mei 2019).

Dalam kenyataannya, pendidikan di Indonesia masih berusaha keras untuk mencapai cita-cita tersebut. Masalah kebangsaan dan meluasnya karakter negatif mulai dari tidak disiplin, suka melanggar aturan, mementingkan diri sendiri, egois, korupsi, merusak lingkungan, hingga mengganggu fasilitas umum, adalah fakta belum menyentuhnya proses Pendidikan dalam melahirkan pribadi yang cinta tanah air dan memiliki semangat kebangsaan. Karena itulah, pemerintah saat ini tengah gencar menerapkan kurikulum pendidikan karakter di sekolah. Hanya saja, pendidikan itu belum mampu melahirkan peserta didik yang masih jauh dari karakter yang diharapkan. Persoalan ini terutama disebabkan:¹⁴

- 1) Ada anggapan kalau persoalan pendidikan karakter/budi pekerti adalah persoalan klasik yang penanganannya menjadi tanggung jawab guru agama dan guru mata pelajaran kewarganegaraan.
- 2) Rendahnya pengetahuan dan pemahaman guru dalam mengembangkan dan mengintegrasikan aspek-aspek pendidikan karakter/budi pekerti ke dalam setiap mata pelajaran yang diajarkan.
- 3) Proses pembelajaran mata pelajaran yang berorientasi pada akhlak dan moralitas serta pendidikan agama cenderung bersifat *transfers of knowledge* dan kurang diberikan dalam bentuk latihan-latihan pengalaman untuk menjadi corak kehidupan sehari-hari.

Sehubungan hal tersebut, tenaga pendidik (guru) dan tenaga kependidikan harus memahami esensi kemajemukan bangsa Indonesia, sejarah pembentukan NKRI, toleransi, dan persatuan, serta cara demokrasi yang bertanggung jawab. Sebelum mengajarkan karakter kepada siswa, guru terlebih dahulu harus

membangun karakter. Jangan sampai guru yang semestinya menjadi pencerah malah terbawa arus. Nalar dan etika sangat penting dalam membangun sikap yang baik dan menghargai perbedaan serta kemajemukan bangsa. Penalaran, toleransi, dan pemikiran terbuka menghasilkan kreativitas yang sangat penting dalam membuat inovasi. Adanya sifat-sifat tersebut membentuk karakter pembelajar seumur hidup yang tidak akan meninggalkan zaman dan mampu berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk tujuan yang mengedepankan kepentingan nasional.

Di sisi lain, lembaga pendidikan harus netral, bebas dari unsur yang bersifat politik. Hal ini akan memungkinkan terwujudnya pendidikan pengembangan karakter yang holistik. Pendidikan harus dibebaskan dari segala unsur yang bersifat politik. Adanya komitmen tersebut bisa membuat pendidikan diberikan secara adil, meritokratik, dan mengusung pengembangan karakter yang horistik guna membangun kemampuan berfikir kritis dan toleran. Hal tersebut perlu ditegaskan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional untuk menghilangkan kelompok partisan menggunakan Lembaga Pendidikan sebagai wahana politik. Pendidikan karakter adalah kesatuan yang terdiri dari kebenaran, kebajikan, dan keindahan. Faktor yang membangun setiap unsur kesatuan itu adalah penalaran, etika, dan estetika.

Guru harus mampu mendorong peserta didik memiliki kecakapan dalam merespon kebutuhan dan keterampilan yang banyak menggunakan teknologi. Pendidikan berbasis teknologi digital dengan sentuhan budaya Indonesia menjadi kunci untuk membangun manusia yang berkualitas dan berkarakter yang terpusat pada keluarga, sekolah dan masyarakat. Perguruan tinggi juga harus melakukan inovasi, adaptasi dan transformasi digital dalam penyelenggaraan kegiatan Tri Darma dan pengelolaan perguruan tinggi. Permasalahan lain yang perlu mendapatkan perhatian adalah belum dimasukkannya pelajaran bela negara dalam

kurikulum sistem pendidikan nasional sebagai mata pelajaran wajib yang harus ditempuh oleh setiap siswa/mahasiswa. Selama ini yang terjadi pendidikan pendahuluan bela negara di tingkat nasional masih diintegrasikan ke dalam mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Perlu juga dipertimbangkan menghidupkan kembali mata pelajaran PMP dan PSBP dalam kurikulum Pendidikan nasional. Masalah lain adalah anggaran yang tersedia sangat terbatas, sehingga penyelenggaraan Pendidikan dan pelatihan bela negara masih terbatas dan belum dilaksanakan secara menyeluruh kepada setiap warga negara.

Dalam kesempatan lain, R. Eko Indrajit mengatakan bahwa dalam rangka meningkatkan kesadaran bela negara dalam pendidikan merekomendasikan upaya-upaya sebagai berikut:

- 1) Bersyukur lahir di Indonesia. Berjalan keliling tanah air untuk berbagi kegiatan seperti studi wisata, dan mendengarkan pendapat orang lain mengenai bangsa ini.
- 2) Bangga menjadi orang Indonesia. Melihat dan mempelajari berbagai mutiara prestasi di berbagai bidang kehidupan di masa lalu maupun di masa yang akan datang.
- 3) Optimis berkarya bagi Indonesia. Kesempatan memperlihatkan berbagai hasil karya inovasi dan kreatifitas dengan membawa atribut dan artefak kebangsaan.
- 4) Siar dan perkenalkan Indonesia. Memamerkan keindahan dan kehebatan Indonesia di mata dunia melalui berbagai event, program, kegiatan, dan inisiatif.

Sementara itu, Arismunandar menyampaikan strategi dalam menciptakan semangat bela negara di perguruan tinggi melalui kegiatan kurikuler, ekstra, dan ko-kurikuler sebagai berikut:

- 1) *General education* (wawasan kebangsaan dan bela negara)
- 2) Pemahaman wawasan kebangsaan (4 konsesnsus dasar: Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI)
- 3) Pendampingan dosen dalam berbagai kegiatan (keagamaan, sosbud, olahraga, penelitian dan lain-lain)
- 4) Pengembangan kecerdasan (*civic intelligence*), tanggungjawab (*civic responbility*), dan partisipasi (*civic participation*) warga negara sebagai landasan pengembangan nilai dan perilaku demokrasi.

b. Kesadaran pembinaan kesadaran bela negara warga negara di era digital

“.....Berikan aku 1.000 orang tua, akan aku cabut semeru dari akarnya, tapi berikan aku 10 pemuda, niscaya akan ku guncangkan dunia....”

(Ir.Soekarno)

Saat pertama kali mendengar pidato Presiden Soekarno tersebut, mungkin kita sempat bertanya-tanya apakah mungkin dan bagaimana caranya hanya dengan 10 pemuda dapat mengguncang dunia? Jika kita merenung dan merefleksikan pidato tersebut, maka jumlah besar saja tidaklah cukup untuk membawa Indonesia menjadi bangsa yang besar dan diperhitungkan di kancah internasional. Kita tidak perlu menunggu bonus demografi untuk memberikan kehormatan yang layak bagi bangsa Indonesia. Kita hanya membutuhkan generasi muda yang berkualitas dan mempunyai visi yang besar dalam menatap dunia.

Ketika beberapa waktu yang lalu, Owi dan Butet berhasil mengembalikan tradisi medali emas di Olympiade Rio de Jeneiro Brasil melalui cabang olahraga bulutangkis. Joe Taslim aktor muda yang mengguncang perfilman Hollywood melalui *Fast and Furious*. Cecep Arif Rahman dan Yayan Ruhian dalam film *John Wick 3* dengan



pencak silat dan dialog memakai Bahasa Indonesia. Di bidang *startup*, Indonesia memiliki anak-anak muda potensial yang omzetnya mengundangi decak kagum pebisnis *on line* di dunia, antara lain Nadiem Makarim pendiri *Go-Jek*, ada Achmad Zaky CEO Bukalapak, Ferry Unardi dengan Travelokanya, dan William Tanuwijaya melalui Tokopedia. Kita baru menyadari bahwa pidato Soekarno tersebut bukan isapan jempol belaka, sehingga seluruh mata dunia terbelalak. Soekarno mempunyai pikiran bahwa pejuang (orang tua) mempunyai kemampuan memajukan bangsa tetapi pemuda yang pikirannya masih muda dapat mengubah bukan hanya bangsa tapi juga dunia.

Lebih khusus lagi, ketika Asian Games berlangsung tahun 2018 lalu, terasa sekali euforia terhadap rasa bangga terhadap Indonesia sebagai tuan rumah *event* yang berlangsung 5 tahun sekali. Sadar atau tidak, bentuk dukungan terhadap atlet Indonesia kemarin itu sebenarnya salah satu bentuk dalam bela negara. Membela negara Indonesia bukan berarti mengangkat senjata untuk bertempur menghadapi musuh, tetapi dalam hal-hal kecil yang dapat berpengaruh kepada majunya negara Indonesia juga termasuk kedalam bela negara. Maka dari itu dengan adanya Asian Games 2018 ini, masyarakat Indonesia secara sadar bersama-sama ikut berpartisipasi dan mendukung acara ini sehingga sukses penyelenggaraannya dan sukses dalam prestasinya. Kita bisa menanamkan bela negara tanpa mengatakan bahwa itu adalah bela negara. Sikap ini yang perlu terus kita tumbuhkembangkan.

Dalam praktiknya, pelaksanaan pembinaan materi bela negara yang dilakukan oleh warga negara, khususnya generasi muda masih belum optimal. Hal ini dikarenakan masih rendahnya tingkat kesadaran warga negara terhadap program bela negara. Bela negara itu hak dan kewajiban warga negara. Bela negara tidak identik wajib militer. Namun dalam

kenyataannya, sebagian besar warga negara belum memperlihatkan kiprahnya dalam upaya bela negara demi kemajuan bangsa. Selain itu, sebagian besar generasi muda lebih banyak menghabiskan waktunya dengan *smartphone*, *handphone* maupun *gadgetnya* dan lebih banyak melakukan kegiatan yang kurang produktif, sehingga kurang adanya kepedulian dalam membela bangsa dan negara. Pada dasarnya, keluarga menjadi pilar dasar dalam pendidikan, sebagaimana Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa pendidikan perlu terbangun dalam tiga pilar atau biasa disebut Tripusat Pendidikan, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat/pemerintah. Dengan demikian, keluarga menjadi sendi kehidupan bangsa yang vital, sesuai dengan Teori *Family Parenting* (Edukasi Keluarga).

Di situasi saat seperti ini, harus ada cara kreatif, murah, dan efektif yang bisa meningkatkan kesadaran bela negara di era digital. Generasi milenial saat ini lebih suka kepada program-program kegiatan seperti:¹⁷

- 1) Olahraga dan permainan digital. Bersifat dinamis, mengasyikkan, membuat ketagihan, menantang, dan memuaskan hasrat berprestasi.
- 2) Musik dan Ragam seni budaya. Memicu kreativitas, kebebasan berekspresi, dan kemampuan berkarya dalam mengekspresikan keindahan.
- 3) Fotografi dan multi media. Media mengekspresikan berbagai ide, inisiatif, keindahan, dan inovasi yang ada dalam imajinasi manusia.
- 4) Startup dan ekonomi kreatif. Model bisnis anak-anak muda yang tidak mengenal Batasan ruang dan waktu, dalam lingkungan ekosistem yang distrustif.
- 5) Petualangan dan media social. Arena bertemu, berkomunikasi, dan berinteraksi.



Sedangkan, hambatan peningkatan kesadaran bela negara yang terjadi dalam era digital saat ini, antara lain disebabkan:

- 1) Minimnya keteladanan
- 2) Minimnya dan lemahnya narasi bela negara yang bisa menjadi counter wacana terhadap gerakan liberalism dan fundamentalis agama
- 3) Minimnyaaa konten kreatif mengenai narasi bela negara yang menarik bagi generasi milenial
- 4) Lemahnya pemahaman sejarah dan tradisi yang bisa menjadi sumber referensi dan pertahanan kultural di kalangan generasi milenial, sehingga mereka mudah terpengaruh terhadap narasi dominan karena miskin referensi dan lemah pertahanan diri
- 5) Lemahnya penegakan hukum yang terkait dengan kasus pertahanan negara

Oleh karena itu, perlu adanya strategi dan upaya peningkatan kesadaran bela negara di era digital dan memperkuat semangat kebangsaan generasi milenial. dalam rangka memperkuat NKRI, antara lain sebagai berikut:

- 1) Peningkatan dan pemanfaatan IT dan media sosial sebagai sarana melakukan sosialisasi dan habituasi masyarakat yang dapat meningkatkan kesadaran bela negara
- 2) Membuat narasi yang kuat mengenai bela negara yang bisa dijadikan sebagai konten medsos yang berfungsi sebagai counter narasi yang bisa mengikis dan melemahkan semangat bela negara
- 3) Agar *counter* wacana berfungsi secara efektif, maka harus dibuat format dan tampilan yang kreatif,

menarik dan sesuai dengan selera generasi milenial.

- 4) Melakukan metode dialogis dan interaksi yang intens dan langsung. Ini dimaksudkan untuk sarana merajut hati dan menanamkan empati. Strategi ini bisa diwujudkan dalam bentuk pertukaran budaya melalui *live in* Bersama, kunjungan dan sejenisnya.
- 5) Keteladanan perilaku hidup dari para elit dan penyelenggara negara yang manfaatnya bisa dirasakan secara nyata
- 6) Menggali praktek kehidupan terbaik (*best practice*) yang terjadi di masyarakat ang bisa menjadi sumber inspirasi bela negara
- 7) Mengunggah keteladanan hidup para elit dan *best practice* masyarakat ke medsos agar bisa menjadi trans setter di dunia maya dan sumber inspirasi di dunia nyata.

Mencermati hal tersebut, kesadaran bela negara mesti terus disegarkan untuk mengatasi masalah kebangsaan yang sedang melanda bangsa Indonesia. Memori kolektif sebagai bangsa yang bersatu di atas berbagai perbedaan perlu terus dirawat. Memori kolektif kebangsaan ini harus didekatkan dengan generasi muda. Kolektifitas pendiri bangsa yang multietnis, multi agama, dan multi suku bangsa mesti terus dirawat, sehingga tidak ada imajinasi untuk mendirikan kelompok yang eksklusif. Kaum moderat diharapkan menghargai perbedaan juga aktif menyebarkan paham toleransi untuk mengimbangi penyebaran konten-konten intoleransi yang sekarang terjadi di masyarakat.

c. Sinergitas Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam



pelaksanaan pembinaan kesadaran bela negara di era digital

“..Kenalilah musuhmu, kenalilah diri sendiri.

Maka kau bisa berjuang dalam 100 pertempuran tanpa risiko kalah.

Kenali Bumi, Kenali Langit,
dan kemenanganmu akan menjadi lengkap..”

(Teori Sun Tzu

Sebuah kalimat sederhana yang bisa dijawantahkan kedalam berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam program bela negara. Memahami dan mengetahui kekuatan sendiri, kita sudah memenangkan separuh peperangan ini (*Sun Tzu*). Hal yang perlu kita garis bawahi adalah *Planning is less than half the battle*. Dengan kata lain, kita harus mengenal potensi diri sendiri, mengetahui kelemahan serta kelebihan diri dan musuh agar tahu apa yang harus dilakukan. Teori Sun Tzu, menjelaskan bahwa suatu kemenangan dapat diraih oleh pasukan yang dijiwai dengan semangat yang sama, pikiran yang sama serta tujuan yang sama, pada semua level/tingkatan baik dari level atas ke bawah maupun sebaliknya. Karena pada dasarnya, suatu program/kegiatan termasuk bela negara dapat terapkan dengan baik apabila memiliki pemahaman, semangat, serta tujuan yang sama dari tiap individu, walaupun berbeda kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah.

Dalam rangka menyelaraskan dan memantapkan upaya Bela Negara menjadi lebih sistematis, terstruktur, terstandarisasi, dan masif, pada 18 September 2018, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional Bela Negara Tahun 2018-2019. Inpres tersebut memberikan instruksi kepada para menteri Kabinet Kerja, Sekretaris Kabinet, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kapolri, Kepala BIN, para pimpinan lembaga pemerintah

nonkementerian, para pimpinan kesekretariatan lembaga negara, para gubernur, dan para bupati/wali kota. Instruksi tersebut memuat tiga hal penting;

- 1) *Pertama*, terdapat tiga tahap Rencana Aksi Nasional Bela Negara (RAN BN) Tahun 2018-2019, yaitu tahap sosialisasi, harmonisasi, sinkronisasi, koordinasi, dan evaluasi; kemudian tahap internalisasi nilai-nilai dasar bela negara; dan tahap aksi gerakan.
- 2) *Kedua*, terdapat modul pedoman dalam melaksanakan RAN BN Tahun 2018-2019 yang disusun dan ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional.
- 3) *Ketiga*, pelaksanaan RAN BN Tahun 2018-2019 dapat mengikutsertakan peran masyarakat dan pelaku usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Terkait poin nomor tiga tentang pelibatan masyarakat dan pelaku usaha dalam RAN BN 2018-2019 tersebut, ada dua hal yang patut menjadi poin sorotan pada bagian *output* yang dijabarkan pada kolom-kolom rincian dalam inpres tersebut. *Pertama*, pada tahap internalisasi nilai-nilai dasar bela negara; dan tahap aksi gerakan, poin lima bagian aksi yang membahas penyelenggaraan pelatihan instruktur bela negara tingkat nasional angkatan I tahun 2018, disebutkan bahwa salah satu *output*-nya adalah terpetakannya segmentasi masyarakat sebagai objek pembinaan bela negara. *Kedua*, pada bagian internalisasi nilai-nilai dasar bela negara kepada masyarakat umum, *output* yang diharapkan dari aksi sosialisasi dan diseminasi pembangunan kesadaran bela negara di kalangan perempuan, pemuda, pelajar, dan mahasiswa adalah terbangunnya pemahaman tentang urgensi bela negara dan terbangunnya rasa cinta Tanah Air, kesadaran berbangsa



dan bernegara, kesetiaan pada ideologi Pancasila, dan kerelaan berkorban untuk bangsa dan negara.

Selain itu, Presiden menginstruksikan kepada para pejabat di atas untuk melaksanakan Rencana Aksi Nasional Bela Negara Tahun 2018-2019 dengan berpedoman pada modul yang disusun dan ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional. Khusus kepada para Menteri Koordinator, Presiden menginstruksikan untuk memfasilitasi Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional dalam mengoordinasikan kementerian dan lembaga dalam melaksanakan Rencana Aksi Nasional Bela Negara Tahun 2018-2019; dan melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Bela Negara Tahun 2018-2019. Presiden juga memberikan instruksi khusus kepada Menteri Dalam Negeri untuk mengoordinasikan pemerintah daerah dalam melaksanakan Rencana Aksi Nasional Bela Negara Tahun 2018-2019, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas untuk melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Bela Negara Tahun 2018-2019; dan Sekretaris Kabinet untuk melakukan pengawasan pelaksanaan Instruksi Presiden ini.

Dengan diterbitkannya Inpres tersebut, mengindikasikan bahwa pelaksanaan program pembinaan kesadaran bela negara yang dilaksanakan selama ini belum selaras dan belum sinergis antar kementerian/ lembaga maupun pemerintah daerah. Kementerian/Lembaga selama ini belum mempunyai kepanjangan tangan sebagai satuan bawah dan sampai saat ini rencana aksi daerahpun masih terbentur birokrasi dan ketersediaan anggaran. Padahal, hubungan atau komunikasi para pihak dalam mewujudkan suatu tugas bersama akan memunculkan berbagai macam pola yang berbeda bila dihadapkan elemen kepercayaan dan kerjasama yang dimiliki oleh pihak masing-masing. Tingkat kerjasama dan kepercayaan yang rendah

akan mengakibatkan pola hubungan komunikasi bersifat pasif/ defensif. Tingkat kerjasama dan kepercayaan yang meningkat memunculkan suatu pola komunikasi yang bersifat kompromi saling menghargai. Dengan kerjasama yang tinggi serta saling mempercayai akan menghasilkan pola komunikasi yang bersifat sinergitas (simbiosis mutualisme) yang berarti bahwa kerjasama yang terjalin akan menghasilkan "Output" yang jauh lebih besar dari jumlah hasil keluaran masing-masing pihak.

Dewasa ini, rasa nasionalisme yang seharusnya tumbuh dan mengakar pada setiap warga negara semakin lama dirasa semakin menurun. Ketidakpedulian dari sebagian warga mengakibatkan kekurangpekaan terhadap berbagai ancaman yang dapat membahayakan stabilitas dan keutuhan negara kita. Ketidakpedulian ini menggambarkan rasa nasionalisme dan kecintaan terhadap Tanah Air semakin menipis. Tentunya menjadi kewajiban bersama untuk menanamkan kembali rasa cinta tanah air yang semakin meluntur dari warga Negara, sehingga tumbuh kemauan dari setiap warga negara untuk turut serta dalam upaya bela negara.

Dengan demikian, kegiatan bela negara tidak boleh monopoli oleh salah satu kementerian atau Lembaga, karena bela negara bukan hanya semata kegiatan militer atau pertahanan. Bela negara adalah semangat dan jiwa kejujuran semua anak bangsa. Bela negara sebagai kewajiban seluruh anak bangsa untuk menjaga negaranya. Hal itu mengacu ke konstitusi dan regulasi di negara ini. Berbagai praktik di banyak negara juga memperlihatkan bela negara adalah kewajiban anak bangsa dan sangat luas karena mencakup semua bidang. Menjaga keutuhan wilayah adalah tanggung jawab dan kewajiban setiap warga Negara Indonesia dalam rangka meningkatkan rasa nasionalisme warga negara terhadap negaranya, kesadaran warga negara terhadap ancaman



yang menjurus pada upaya disintegrasi bangsa. Untuk itu dirasa sangat penting bagi suatu bangsa yang terhormat untuk senantiasa menjaga dan meningkatkan rasa nasionalisme setiap warga negara dalam upaya mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Namun demikian, yang perlu menjadi bahan pemikiran bersama, keberadaan Inpres tersebut hanya terbatas untuk memberikan arahan, menuntun, membimbing dalam hal pelaksanaan tugas dan pekerjaan. Selain itu, Inpres tersebut hanya bersifat sementara karena dibatasi oleh waktu (September 2018 sampai dengan Desember 2019). Bagaimana nasib pendidikan kesadaran bela negara pasca tahun 2019? Mampukah Dewan Ketahanan Nasional mengkoordinasikan semua kementerian/Lembaga dan pemerintahan daerah dalam pelaksanaan rencana aksi nasional bela negara?

PENUTUP

Simpulan

Pemerintah sebetulnya sudah melakukan banyak hal untuk meningkatkan kesadaran bela negara. Pemerintah telah mengeluarkan dan memiliki berbagai perangkat dan infrastruktur regulasi dalam menangani masalah menurunnya semangat bela negara. Kesadaran bela negara bukanlah bawaan sejak lahir, sehingga perlu ditumbuhkembangkan melalui program-program pembinaan kesadaran bela negara. Penyelenggaraan pembinaan bela negara dilaksanakan sejak dini hingga usia dewasa guna membangun karakter bangsa Indonesia dapat dilakukan melalui program peningkatan pembinaan kesadaran bela negara, optimalisasi kurikulum pendidikan dan pembinaan bela negara dan meningkatkan sinergitas antar Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan metode dan materi pembinaan kesadaran bela negara di era digital.

Rekomendasi

a. Jangka Pendek

- 1). Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyempurnakan kurikulum Pendidikan bela negara dengan menghidupkan lagi mata pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP) dan Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa (PSPB) mulai Pendidikan usia dini, Pendidikan dasar, menengah dan tinggi.
- 2). Kementerian/Lembaga maupun pemerintah daerah lebih mengintensifkan penyelenggaraan Pendidikan dan pembinaan kesadaran bela negara di lingkungan pekerjaan, masyarakat desa dan kota, serta merevisi materi pembinaan kesadaran bela negara yang relevan dengan era digital.
- 3). Kementerian/Lembaga maupun pemerintah daerah menyiapkan tenaga pendidik yang berkompetensi dan sarana dan prasarana Pendidikan dan pembinaan bela negara sesuai dengan perkembangan teknologi dan informasi saat ini
- 4). Kementerian/Lembaga maupun pemerintah daerah membuat lomba/sayembara pembuatan film tentang aplikasi empat konsensus kebangsaan dalam kehidupan. Generasi muda saat ini lebih suka menonton tayangan daripada membaca. Sehingga pendekatan pemahaman nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika akan sangat efektif jika dibuat dalam video-video singkat yang menggambarkan penerapan empat konsensus kebangsaan tersebut dalam kehidupan sehari-hari.



- 5). Kementerian/Lembaga maupun pemerintah daerah membuat *game* atau video maupun lomba cipta lagu sejarah perjuangan bangsa yang menimbulkan semangat bela negara generasi muda. Lomba tersebut bisa dibuat berjenjang untuk level SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, dan masyarakat umum. Video ini bisa diunduh secara gratis di internet atau juga bisa ditayangkan di TV swasta. Video-video ini bisa dibuat atas inisiatif dan kerja sama beberapa kementerian, dengan memberdayakan Para “*Youtuber*” maupun “*Influencer*” guna menarik minat generasi milenial di era digital.

b. Jangka Panjang

- 1). Kementerian/Lembaga maupun Pemerintah daerah meningkatkan sinergi utama dalam pembinaan bela negara, yang meliputi:
 - a). Sinergi program dan kegiatan. Materi pembinaan bela negara harus memiliki karakteristik yang menekankan kepada upaya bela negara agar tidak tumpang tindih (*overlapping*) dengan program lainnya.
 - b). Pola Strategi. M a t e r i pembinaan bela negara harus saling melengkapi dan saling mengisi terutama dalam penanaman nilai-nilai karakter yang relevan dengan empat konsesus dasar.
 - c). Tujuan Sinergi. U n t u k percepatan pencapaian target nasional dengan cara berkesinambungan berkoordinasi membangun kerjasama dan menguatkan program dan sumber daya yang meliputi materi pembinaan yang distandarkan dan dievaluasi secara periodik, sarana dan prasarana pembinaan yang tepat dan memadai.
- 2). Membangun jejaring strategis antara negara, pemerintah dengan masyarakat baik secara nyata dan maya untuk menghasilkan sinergi yang akan memperkuat keutuhan NKRI, terutama mahasiswa dan siswa, dapat berperan dalam menghadapi ancaman nasional baik militer maupun non militer (KKN, narkoba, dan terorisme-radikalisme)
- 3) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah meningkatkan sinergi lintas sektoral dan melakukan penyesuaian materi pembinaan bela negara untuk menghindari duplikasi program kerja dan anggaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Raden Ridwan Hasan Saputra, 2019. *Program Bela Negara Zaman Now*. Pendiri Klinik Pendidikan MIPA, Penggagas Wisata Matematika Bela Negara dalam <https://www.republika.co.id/berita/jurnalisme-warga/wacana/17/12/19/p17mmq396-program-bela-negara-zaman-now>. Diakses pada tanggal 23 Mei 2019.
- Hamid Muhammad, 2019. *Meningkatkan Kesadaran Bela Negara Siswa Indonesia di Era Digital*. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud RI. Disampaikan pada *Focus Group Discussion* Kajian Wantimpres pada tanggal 22 Mei 2019.
- Esa Sukmawijaya, 2019. *Meningkatkan Kesadaran Bela Negara Pemuda Di Era Digital Untuk Memperkokoh NKRI*. Asisten Deputi Bidang Pemberdayaan



- Pemuda Kemenpora RI. Disampaikan pada *Focus Group Discussion* Kajian Wantimpres pada tanggal 22 Mei 2019.
- Ngatawi Al Zastrouw, 2019. *Bela Negara Di Era Digital, Strategi Memperkuat Semangat Kebangsaan Generasi Milenial*. Disampaikan pada *Focus Group Discussion* Kajian Wantimpres pada tanggal 09 Mei 2019.
- Laporan Daily Sosial, 2018, *Distribusi Hoax di Media Sosial 2018* dalam [https://dailysosial .id/ post/laporan-dailysosial-distribusi-hoax-di-media-sosial-2018](https://dailysosial.id/post/laporan-dailysosial-distribusi-hoax-di-media-sosial-2018). Diakses pada tanggal 24 Mei 2019.
- Kementerian Komunikasi dan Informasi, dalam [https://kominfo. go. id / content/ detail/12008/ada-800000-situs-penyebar-hoax-di-indonesia/0/sorotan_ media](https://kominfo.go.id/content/detail/12008/ada-800000-situs-penyebar-hoax-di-indonesia/0/sorotan_media). Diakses pada tanggal 3 Januari 2019.
- <https://nasional.kompas.com/read/2018/03/15/06475551/bin-60-persen-konten-media-sosial-adalah-informasi-hoaks>. Diakses pada tanggal 3 Januari 2019.
- Timbul Siahaan, 2019. “Program Bela Negara Dibagi Tiga Kategori, Ini Penjelasannya”, dalam <https://nasional.kompas.com/read/2015/10/19/10263901/Program.Bela.Negara.Dibagi.Tiga.Kategori.Ini.Penjelasannya>. Penulis : Abba Gabrillin. Diakses pada tanggal 23 Mei 2019.
- Bondan Tiara Sofyan, 2019. *Meningkatkan Kesadaran Bela Negara Di Era Digital Untuk Memperkokoh NKRI*. Disampaikan pada *Focus Group Discussion* Kajian Wantimpres pada tanggal 9 Mei 2019.
- H. Warlin, 2014. *Revitalisasi Nilai-nilai Kesadaran Bela Negara Bagi Generasi Muda Guna Meningkatkan Nasionalisme Dalam Rangka Ketahanan Nasional*. Kertas Karya Perorangan PPRAAngkatan LI Lemhannas RI, h. 39.
- Dadan Umar Daihani, 2019. *Memelihara Nilai-nilai Kebangsaan di Era Kekinian*. Tenaga Profesional bidang Sumber Kekayaan Alam dan Ketahanan Nasional. Disampaikan pada saat Orasi Ilmiah HUT Lemhannas RI ke-54 pada tanggal 20 Mei 2019.
- Puslabkurtannas Lemhannas RI tahun 2018
- Prof Dr. Ir. Dadan Umar Daihani, DEA, “*Pengembangan Sistem Pengukuran Ketahanan Nasional dan Simulasi Kebijakan Publik Berbasis GIS*”. Tenaga Profesional Lemhannas RI. Bahan Paparan. Labkurtannas Lemhannas RI.
- TB. Hasanuddin, 2014. *Bela Negara Dan Kontradiksi Wacana Wajib Militer Indonesia*. Penerbit; RMBOOKS, PT. Wahana Semesta Intermedia, Jakarta, h.102-103.
- Richardus Eko Indrajit, 2019. *Bela Negara Di Era Digital*. Disampaikan pada *Focus Group Discussion* Kajian Wantimpres pada tanggal 22 Mei 2019.
- Arismunandar, 2019. *Meningkatkan Kesadaran Bela Negara Di Era Digital Untuk Memperkokoh NKRI*. Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi. Disampaikan pada *Focus Group Discussion* Kajian Wantimpres pada tanggal 09 Mei 2019.
- Richardus Eko Indrajit, 2019. *Bela Negara Di Era Digital*. Disampaikan pada *Focus Group Discussion* Kajian Wantimpres pada tanggal 22 Mei 2019.
- Ngatawi Al Zastrouw, 2019. *Bela Negara Di Era Digital, Strategi Memperkuat Semangat Kebangsaan Generasi Milenial*. Disampaikan pada *Focus Group Discussion* Kajian Wantimpres pada tanggal 09 Mei 2019.